REFORMASI BIROKASI DAN OTONOMI DAERAH

Oleh:

Wawan Dharma Setiawan*)

PENDAHULUAN

Sejak kemerdekaan Negara Republik Indonesia (NKRI) dikumandangkan, Otonomi Daerah menjadi pilihan sistem utama yang diterapkan dalam perundangan penyelenggaraan administrasi negara. Hanya saja pada tataran implementasi, pilihan sistem itu dihadapkan pada berbagai kendala yang berimplikasi pada tersendatnya Hukum Administrasi Publik, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Salah satu produk pilihan Sistem Otonomi Daerah termuat dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyerahan otonomi yang menitikberatkan pada penguatan pemerintahan Kabupaten dan Kota, dimana pusat berfungsi memegang urusan utama, antara lain berkenaan dengan moneter, pertahanan dan keamanan, hukum, agama, dan moneter, selebihnya, wewenang diserahkan pada Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Kabupaten maupun Kota.

Demikian kuatnya pilihan Sistem Otonomi Daerah menjadikan beberapa pihak tidak lagi cermat memperhatikan pelaksanaannya. Kecermatan mestinya diarahkan pada kondisi eksisting Pemerintah Daerah yang berupa kesiapan SDM, sarana prasarana maupun anggaran yang sepatutnya. Kecermatan memandang kondisi Pemerintah Daerah dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) seluruhnya benar-benar siap menerima kewenangan yang akan dilimpahkan dengan mencermati kondisi SDM, SDA dan pendanaannya?
2. Apakah waktu untuk menetralisasikan penerimaan kewenangan sudah dipandang cukup oleh Pemerintah Daerah?
3. Tanpa Deseminasi, apakah sosialisasi berkenaan dengan hal tersebut dipandang cukup sementara berbagai level masyarakat di daerah belum sepenuhnya memahami hakekat dari kebijakan tentang otonomi tersebut?

Berbagai pertanyaan lanjut masih dapat diarahkan, akan tetapi tiga pertanyaan di atas dipandang mendasar dan menuntut untuk segera diatasi. Hal ini untuk mencegah keraguan sebagian kalangan yang memandang kebijakan otonomi sebagai keputusan yang diambil secara tergesa-gesa dan kurang perhitungan sehingga perlu direvisi atau ekstrimnya ditanggihkan.

Otonomi Daerah pada dasarnya menjadi bagian dari upaya mendorong terwujudnya *good goveranance* di Indonesia. Dengan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang belum siap diprediksi oleh sebagian kalangan akan tidak bisa melaksanakan *good local goveranance*. Sikap pesimisme yang berlebihan ini didasarkan atas realitas pemerintahan daerah yang sampai saat ini belum dapat membebaskan fenomena yang bersifat laten. Gejala yang diisukan tersebut berupa:

*) Kabid Litbang KMKPOA, PKP2A I LAN Bandung

1. Masih tetap tingginya sikap dan primordialis, baik pada kalangan terbatas maupun kalangan luas;
2. Sebagian masyarakat daerah belum merasakan adanya perubahan yang berarti dalam sistem pelayanan yang diberikan pemerintah;
3. Orientasi birokrasi belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan masyarakat bawah,
4. Demokratisasi dengan pilkada masih kental; bernuansa perebutan kekuasaan yang dibayar dengan uang rakyat secara berlebihan;
5. Elit politik lokal yang *psudo* atas kampanye peduli dengan konstituennya, yang sebenarnya mengokohkan loyalitas pada elit partai semata;
6. Perumusan Visi dan Misi pemerintahan sebatas retorika belaka;
7. Tidak adanya kemampuan untuk mengakomodir keinginan dan harapan masyarakat untuk berubah kearah yang lebih baik.

Isu dan fenomena tersebut memang merupakan sebagian permasalahan yang dipandang konsekuensi proses berdemokrasi, dimana *outcomes* pada masyarakatnya sangat tidak berfaedah secara langsung. Seharusnya demokratisasi adalah sebagai alat saja bukan tujuan dari Otonomi Daerah. Pengamatan di berbagai daerah menunjukkan adanya persepsi yang hampir sama, terutama kalangan menengah ke bawah, sebagai berikut:

1. Dirasakan semakin berat perolehan kebutuhan hidup yang murah dan terjangkau,
2. Semakin sulit memperoleh pekerjaan yang mudah dengan penghasilan yang layak,
3. Semakin tingginya biaya pendidikan dan kesehatan,
4. Keamanan dan ketertiban dalam kehidupan semakin mengarah pada ketidakdisiplinan.

Pemenuhan keinginan dan harapan masyarakat merupakan kewajiban pemerintah sesuai dengan amanat UUD'45. Pemerintah memiliki keharusan untuk dapat merealisasikan hak setiap warga negara dalam mendapatkan berbagai kebutuhan hidup yang layak.

Presiden RI pada tanggal 22 Maret 2007 dalam acara Peluncuran Buku "*Kerangka Dasar Visi Indonesia 2030*" dalam sambutannya mengatakan: " Bangsa Indonesia diyakini bisa masuk dalam lima besar ekonomi dunia 2030, asalkan seluruh komponen bangsa bekerjasama dan bersinergi mengelola berbagai keunggulan serta menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada". Selanjutnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Rapat dengan para Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia mengemukakan adanya keharusan para pejabat publik yang berasal dari partai politik agar memiliki loyalitas yang tinggi terhadap pemerintah dan bukan hanya pada partai semata. Hal ini agar para pejabat publik lebih berorientasi pada kepentingan rakyat, bangsa dan negara *ketimbang* kepentingan partai.

Dalam kenyataan, himbauan yang bertubi-tubi tidak menjadikan para pejabat publik bergeming. Memang untuk menyerukan dan mengharap amatlah mudah. Saat ini "jarang" ditemui pejabat publik yang memiliki itikad baik yang sesungguhnya untuk mengabdikan pada kepentingan masyarakat luas. *Pejabat publik juga manusia* yang juga ikut berperilaku sebagaimana manusia lain yang ada di sekitarnya.

Salah satu negarawan yang terbukti memiliki komitmen dengan bangsa dan negara adalah Mantan Wakil Presiden Bung Hatta (Alm.) yang diungkapkan dalam buku *"Biografi Politik Bung Hatta"* yang dirilis oleh Deliar Noer tahun 1990. Pada bagian awal, Bung Hatta dielaborasi sebagai orang besar yang dihormati kawan dan lawan (1981). Sejak muda hidupnya didedikasikan untuk masyarakat luas. Demikian juga pemikiran dan keberpihakannya amat jelas. Sikap kenegarawanan sebagai pejabat publik seperti ini masih patut ditiru, sekalipun harus meninggalkan jabatannya bila menyimpang dari garis perjuangan demi kepentingan masyarakat.

Dalam kaitan dengan kebijakan Otonomi Daerah, sistem politik saat ini antara lain dengan adanya pemilihan Presiden, DPR, DPD serta Pilkada pada dasarnya adalah untuk melahirkan pejabat publik yang diharapkan berorientasi pada kepentingan rakyat dalam visi dan misi. Penyimpangan dari maksud tersebut, bukan hanya menyisakan kegagalan melainkan "dusta" kepada masyarakat. Nilai dusta kebohongan publik tiada terkira, karena menyabot kue nasional yang seharusnya menjadi jatah kelompok masyarakat miskin di nusantara.

Para Pejabat Publik dari kalangan politik harus menyadari sepenuhnya bahwa mereka ada karena ada pemilihnya yakni rakyat dengan harapannya. Dia diusung dan dipercaya oleh rakyat, jadi harusnya menyadari hidupnya diusung oleh kepahitan dan kegetiran kelompok masyarakat yang berharap terangkatnya kehidupan secara perlahan. Para pejabat harus bias membuat keputusan kearah yang lebih baik, bertanggung jawab, terbuka dan menjunjung penegakan dan atau kepastian hukum.

REFORMASI DALAM PERJALANAN OTONOMI DAERAH

Reformasi dimulai tujuh tahun yang lalu, ketika pada tahun 1997, negara dan bangsa didera krisis moneter dimana laju inflasi mencapai 77,36% dari sebelumnya 11,1%. Dengan pendapatan yang tidak berubah dibanding laju inflasi seperti tersebut, maka kehidupan masyarakat banyak menjadi sangat terpuruk. Bandingkan jumlah orang miskin pada tahun 1994-1995 sebesar 13,7% dari jumlah penduduk pada tahun melonjak 17,7% dan pada tahun 1998 24,2% (Media Indonesia, 28 Mei 2007). Kenyataan ini menjadikan nasib kelompok masyarakat miskin menjadi marah dan kemudian *cheos*.

Perubahan dalam bidang politik cukup cepat dengan berhasilnya melaksanakan pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat, kemudian pemilihan Kepala Daerah. Tetapi di bidang ekonomi yang menyangkut kehidupan rakyat banyak sangat sedikit berubah, artinya perubahan bidang politik tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan perubahan ekonomi rakyat, yang akhirnya berdampak pada kehidupan sosial rakyat.

Secara statistik, sejak Presiden Habibie sampai Susilo Bambang Yudhoyono terlihat pergerakan laju pertumbuhan ekonomi 3,4% sampai 5% dalam tiga tahun terakhir malah sampai pada angka 7%, tetapi fakta memperlihatkan peningkatan jumlah orang miskin dari 35,10 juta (2005) atau 15,97% pada tahun 2006 meningkat sampai 39,05 juta (17,75%) sampai Maret 2006.

Suatu fakta melalui otonomi dengan azas desentralisasi yang dipayungi Undang-undang 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan diganti dengan Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah belum berdampak pada perbaikan kehidupan rakyat dan bangsa pada umumnya, padahal jiwa kedua Undang-Undang tersebut akan

memberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memberikan perbaikan pada kehidupan khususnya perekonomian rakyat.

Reformasi yang berjalan adalah sebuah produk politik yang diharapkan dapat memicu laju pertumbuhan ekonomi baik di pusat terutama di daerah yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan bangsa. Otonomi Daerah yang diberikan melalui Undang-Undang No. 32 tahun 2004 mencoba menghilangkan prinsip dalam Undang-Undang yang terdahulu yang mengatur tentang daerah dimana pada saat itu dianut otonomi riil dan nyata menjadi menjadi urusan yang diserahkan pemerintah pusat pada daerah. Masalahnya apakah daerah siap menerima banyak urusan yang harus dijalankan. Ini perlu kajian yang mendalam untuk menjawabnya, tetapi sementara diasumsikan oleh penulis, pelaksanaan otonomi sesuai dengan Undang-Undang yang baru, dimana pertimbangan kesiapan Sumber Daya Manusia, infrastruktur, dana dan sistem belum mampu menjawab amanat Undang-Undang tersebut.

Kenyataan ini mengisyaratkan pemerintah daerah harus mampu mengambil alih peran pemerintah pusat karena kewenangan seluruhnya di ke"daerah"kan kecuali lima kewenangan yang dipegang pusat, walaupun masih ada pasal yang menyebutkan kewenangan pemerintah pusat "dan lain lain kewenangan yang dianggap masih dikelola pemerintah pusat" *statement* pasal ini sebetulnya menjadi kurang memperjelas kewenangan daerah dan membuat keraguan daerah. Sebaiknya "...dan lain lain kewenangan" tersebut secara eksplisit disebutkan saja, jangan ada area abu-abu yang akhirnya tidak efektif dan efisien.

Pemerintah daerah harus efisien dalam menjalankan pemerintahan di bidang belanja atau pembiayaan publik, dimana pemerintah pusat telah menyederhanakan jalur redistribusi pendapatan daerah. Di masa lalu pemerintah pusat memegang kekuasaan yang besar terhadap anggaran daerah, sekarang disederhanakan melalui mekanisme dana perimbangan.

Dalam kaitan itu, pemerintah daerah harus berpikir inovatif untuk mengambil alih peran pemerintah pusat dalam rangka mengembangkan perekonomian daerah masing-masing. Yang terjadi dengan alasan meningkatkan pendapatan daerah tetapi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerahnya. Muncul banyak Peraturan Daerah (Perda) dalam peningkatan penerimaan pajak daerah serta pungutan-pungutan lain dan berdampak pada pemerasan pada pengusaha atau perusahaan yang ada di daerah. Hal itu karena perda tersebut hanya mengundang ekonomi biaya tinggi bagi pengusaha. Pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dan akhirnya pada laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Desentralisasi dalam kaitan Otonomi Daerah dapat berpengaruh buruk terhadap perekonomian daerah, pemerintah daerah tidak disiplin pada kebijakan fiskal, penggunaan anggaran yang boros sering terjadi, hanya beberapa daerah yang pada saat ini dapat dijadikan contoh antara lain Kabupaten Sragen, Kabupaten Jembrana untuk biaya pendidikan dasar iuran mendekati nol dan pelayanan pada masyarakat yang sudah standar sesuai peraturan perundangan dan kehendak rakyat.

Sedikitnya Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki kinerja optimal dalam pelayanan pada masyarakat membuktikan pemerintah daerah belum siap melaksanakan desentralisasi sebagai bagian dari upaya reformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hal ini peranan masyarakat dalam memperbaiki kinerja pemerintah daerah sangat strategis, namun kemampuan masyarakat untuk mengawasi belum juga optimal,

baru LSM yang ada memberikan tekanan tekanan pada Kepala Daerah beserta jajarannya apabila sudah sangat buruk dalam memberikan pelayanan. Pemerintah Pusat sebagai Pengendali penyelenggaraan pemerintahan daerah harus menstimulasi dengan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerah serta memberikan sanksi jika menyimpang dari ketentuan yang telah ada.

PILKADA SEBAGAI ALAT REFORMASI DI DAERAH

Pada era reformasi, rakyat di daerah memegang peranan penting dalam menentukan pilihan-pilihan yang terbaik bagi daerahnya termasuk pilihan pimpinan daerahnya, karena rakyat tidak dapat terlalu tergantung pada pemerintah pusat seperti pada waktu yang lalu.

Dalam kenyataan, beberapa penyelenggaraan pilkada mengundang konflik karena cara yang dilakukan dalam meraih kekuasaan tidak dilakukan dengan cantik, muncul istilah politik uang, mengadudombakan antarcalon peserta pilkada, sumber dana kampanye yang tidak jelas, akhirnya menimbulkan konflik horizontal di samping konflik vertikal dan hal ini harus dibayar dengan sangat mahal, sehingga rakyat turut menanggung beban.

Kecenderungan, hasil reformasi hanya menimbulkan nada pesimis dan memunculkan perasaan yang romatis tentang masa orde baru di hati rakyat. Reformasi melalui otonomi daerah dengan desentralisasi kewenangan yang banyak pada daerah diasumsikan belum membawa perubahan nyata yang signifikan bagi masyarakat dan bangsa. Secara jujur ada sisi yang sebenarnya mulai berubah namun seperti diuraikan di atas, perubahan belum menyentuh rakyat banyak.

PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI ALAT REFORMASI

Tujuh tahun berlangsungnya pelaksanaan Otonomi Daerah, telah memperlihatkan pelaksanaan masih berjalan dengan baik, seperti disebutkan di atas bahwa konsep otonomi yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004, jiwanya adalah sebagai suatu tawaran dalam rangka mempertahankan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Pemerintah Daerah diharapkan mampu membangun daerah sendiri sesuai kebutuhan rakyat dan juga disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Walaupun dilihat dari Hukum Administrasi Negara penerapan otonomi daerah di Indonesia tidak seragam, seperti otonomi khusus Nanggroe Aceh Darusallam (NAD), Daerah Istimewa Yogyakarta, Propinsi Papua, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Otorita Batam.

Mendekatkan kesenjangan ekonomi rakyat dalam berbagai stratifikasi kehidupannya bagi politisi yang minoritas dijadikan sebagai kesempatan untuk dapat mengais rejeki pada sumber daya ekonomi. Kewenangan yang besar diberikan kepada para pejabat di daerah yang mengakibatkan pembuatan yang kewenangan dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Mencuatnya berbagai kasus korupsi di berbagai daerah sebagai bukti yang tidak terbantahkan. Contoh suatu daerah yang memiliki kemampuan meningkatkan kesejahteraan rakyat karena merupakan kabupaten terkaya, yaitu Kabupaten Kutai Kertanegara di Propinsi Kalimantan Timur. Hal ini merupakan suatu bukti tidak dijamin seorang kepala daerah seperti tersebut akan terlepas dari tindakan korupsi (Litbang Media Indonesia).

Upaya peningkatan PAD sering dijadikan pembenaran dan alasan oleh politikus lokal untuk mengeluarkan berbagai kebijakan yang pada akhirnya memberatkan rakyat termasuk para pengusaha lokal maupun investor luar. Ada baiknya paradigma berfikir dibalik, yaitu mengutamakan pelayanan pada masyarakat yang dengan sendirinya akan menaikkan PAD. Pada saat ini upaya meningkatkan PAD dan pemenuhan kebutuhan anggaran daerahnya dijadikan alasan elite lokal untuk mengeluarkan berbagai peraturan, dan sering kali tidak dilaporkan pada pemerintah pusat, maka terlihat banyaknya Perda tentang Pajak dan Retribusi.

Dilihat dari sisi penerimaan PAD, yang terbesar dari keseluruhan penerimaan daerah, dari 33 Propinsi saat ini pada tahun 2006 kontribusi PAD terhadap keseluruhan penerimaan mencapai rata-rata 42%, kontribusi PAD Jawa Timur terhadap total penerimaan 2006 mencapai 77% (3,5 Triliun rupiah), tetapi pada saat yang sama kontribusi propinsi lain sangat kecil seperti Propinsi Maluku Utara hanya 8% (32 Juta rupiah) kemudian Propinsi Irian Jaya Barat hanya 4% (18,6 juta rupiah).

Kesenjangan seperti ilustrasi tersebut, mau tidak mau harus melibatkan pemerintah pusat, maka pemerintah pusat harus menambah, meningkatkan alokasi anggaran bagi daerah, apalagi bagi daerah-daerah yang baru dimekarkan (Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan).

Untuk itu, pemekaran daerah harus dipikirkan berbagai prasyaratnya. Selama ini hanya untuk kepentingan minoritas elite politik lokal dan persyaratan-persyaratan administratif, maka kedepan prasyarat harus lebih berat, artinya lebih selektif agar pemekaran daerah betul-betul suatu kebutuhan karena pendapatan yang sudah sangat besar, jumlah penduduk yang padat dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga perlu pemekaran, walaupun dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah sudah merubah status kecamatan dari aparat dekonsentrasi menjadi aparat desentralisasi. Artinya menjadi kepanjangan tangan dari para Bupati, Walikota yang dapat diberikan berbagai kewenangan dan urusan, tanpa harus memekarkan daerah.

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka komponen Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat pada daerah harus dipertimbangkan untuk dihapuskan bagi daerah-daerah yang sudah mapan. Diharapkan daerah dengan PAD kecil akan memacu pertumbuhan ekonomi dengan "baik" melalui antara lain pemanfaatan sumber yang dimilikinya secara optimum tanpa merusak ekologi. Dengan demikian reformasi di bidang ini belum menyentuh rakyat banyak.

PENINGKATAN PERANAN DESA

Desa sebagai suatu kesatuan hukum adat yang menyelenggarakan pemerintahan sendiri dan Kepala Desa dipilih langsung oleh rakyatnya telah ada sebelum zaman kemerdekaan. Posisi desa terutama di Jawa dan Madura (nama Desa) paling dekat dengan rakyat, dengan demikian diasumsikan paling tahu kebutuhan masyarakatnya. Sayangnya pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang Menghapuskan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Desa tidak diatur dengan jelas posisi dan kewenangan Desa, tetapi keberadaan desa harus didayagunakan secara optimal dalam proses pembangunan bangsa dan negara.

Pasal 1 ayat (1) UUD '45 tidak perlu diperdebatkan dalam membahas berbagai persoalan bangsa lebih lebih di bidang Hukum Administrasi Negara khususnya yang menyangkut hubungan pemerintah pusat dan daerah, dalam pasal 18 ayat (5) UUD'45 telah jelas mengatur dan tidak dimultitafsirkan dimana Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas luasnya kecuali yang ditentukan oleh Undang-Undang masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pilihan bentuk NKRI memang tidak bermaksud mengambil alih hak kedaerahan, para pembentuk Undang-Undang Dasar pasti tidak memiliki maksud untuk menciptakan Republik Indonesia menjadi negara kesatuan yang sentralistik.

Undang undang yang mengatur Desa telah empat kali berubah, dan setiap undang undang tersebut memiliki model sendiri, tidak pernah konsisten kemana arah pengaturan Desa. Hal ini disebabkan sistem pembentukan perundang undangan mengenai Desa pada setiap level pemerintahan didominasi kemauan pemegang kekuasaan yang tidak memiliki mekanisme menjangkau keterlibatan pemerintahan desa apalagi menyerap aspirasi masyarakatnya, akibat buruknya adalah desa berwujud sesuai kemauan pemerintah pusat dan kehilangan karakteristiknya.

Membandingkan dengan negara negara lain, mengatur Desa harus dimulai dari sisi Administrasi Negara, akan diletakkan dimana kedudukan desa dalam struktur ketaanegaraan, karena desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang otonom. Desa merupakan bagian dari ketatanegaraan bukan merupakan aspek administrasi saja yang sewaktu waktu dapat dibubarkan atau dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena kedudukan desa akan berimplikasi terhadap tugas pokok dan fungsi, kewenang, keuangan dan pengawasan, peranggungjawaban serta ubungan dengan pemerintahan yang lain.

Setiap Undang undang di NKRI memberi kedudukan desa berbeda beda, ketika UU No. 19 tahun 1965 desa ditempatkan sebagai daerah Tingkat III dengan sebutan Desa Praja. Hal ini tidak pernah terwujud, UU No. 5 Tahun 1979 meletakkan desa berkedudukan langsung dibawah Camat merupakan kepala wilayah yang menjalankan satuan wilayah vertikal (Dekonsentrasi). Pada UU Nomor 22 tahun 1999 desa diletakan sebagai sub sistem dari pemerintahan yang pengaturannya lebih lanjut diserahkan pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota melalui Peraturan Daerah, terakhir melalui UU No. 32 tahun 2004 kembali menempatkan desa dalam suatu Undang undang tentang Pemerintahan Desa.

Pasal 200 UU 32/2004 menyebutkan "Dalam Pemerintahan Kabupaten/Kota dibentuk pemerintahan Desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa". Dengan demikian maka kedudukan Desa menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten/Kota, jika salah menempatkan akan kehilangan otonominya dan hanya akan berfungsi sebagai alat administrasi saja bagi Kabupaten/ Kota.

Dari uraian di atas betapa dapat dilihat bahwa peranan Desa akan sangat penting sebagai ujung tombak yang terdekat dengan masyarakat dalam sistem Administrasi Negara NKRI.

REKOMENDASI

Dari uraian di atas dengan membagi kepada beberapa segmen bahasan, maka dapat direkomendasikan hal hal sebagai berikut:

1. Dalam penyerahan kewenangan/urusan Pemerintah pusat pada Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota sebaiknya jangan diseragamkan, disesuaikan dengan kemampuan daerah yang bersangkutan, yang sebelumnya harus dipersiapkan Sumber Daya manusia baik aparatur maupun masyarakat, dana, infra struktur, sarana dan prasarana yang akan menunjang pelaksanaan kewenangan kewenangan yang akan diterima daerah,
2. Pemekaran wilayah diwajibkan berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang bukan hanya administratif saja. Jadi syarat harus lebih banyak, karena selama ini hanya untuk kepentingan minoritas elite politik lokal saja, masyarakat tetap tidak terlayani malah ekonomi biaya tinggi yang muncul,
3. Peraturan-peraturan daerah yang dikeluarkan harus diproses secara demokratis, berkeadilan, memberi kemasalahan, keuntungan bagi masyarakat,
4. Pada setiap Parpol diwajibkan bila perlu diberikan rambu-rambu untuk membentuk kader yang profesional dan kompeten, sehingga mampu menyerap aspirasi masyarakat, mampu mengimbangi eksekutif daerah, diharapkan akan terjadi efisensi dan efektivitas jalannya pemerintahan di daerah,
5. Peranan Kecamatan dan Desa sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten dan Kota dioptimalkan dengan melakukan kajian yang lebih baik tentang kompetensi yang dibutuhkan, jika mungkin adanya tipologi karena perbedaan beban kerja antara satu daerah dengan daerah lainnya.